



Surabayanews.co.id - Rupanya tidak hanya terbentur masalah administrasi pada sejumlah instansi pelayanan publik dan perbankan. Dampak negatif kurangnya pemenuhan target E-KTP makin bertambah. Karena, per tanggal 19 Maret 2014 Badan Pertanahan RI mensyaratkan pengurusan pelayanan urusan tanah menggunakan E-KTP.

Peraturan penggunaan E-KTP dalam pengurusan layanan tanah di BPN sendiri, untuk mempercepat target pemenuhan E-KTP warga Surabaya, yang masih kurang 400 ribu penduduk.

Kepala Dinas Kependudukan Capil Surabaya, Suharto Wardoyo, saat ditemui disela-sela Paripurna Raperda Pelayanan E-KTP seakan tidak memiliki daya untuk memenuhi target tersebut. Karena masalah perekaman dan penerimaan masih dalam upaya pemenuhan seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kita dari Dispendukcapil Surabaya telah menambah target perekaman tiap harinya 160 kelurahan di surabaya,”terangnya

Langkah persyaratan tersebut merupakan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang tidak lagi mau menerima pelayanan urusan pertanahan dengan menggunakan KTP lama. (yud/fan)